



doi: <http://dx.doi.org/10.25157/ja.v12i1.17979>

Dinamika Kehidupan Nelayan Pangandaran 1970-2012: Transformasi Sosial Ekonomi dalam Konteks Negara Maritim

Rezza Fauzi Muhammad Fahmi ^{1*}, Egi Nurholis ², Tiara Kirani Rahayu ³, Rosa Meilani ⁴, Alma Apriliani ⁵, Afyah Armina Ramadhan ⁶

¹ Universitas Padjadjaran, Indonesia

² Universitas Galuh, Indonesia

^{1, 3, 4, 5, 6} STIABI Riyadul 'Ulum, Indonesia

Email Correspondent: rezzafauzi@stiabiru.ac.id / rezza14001@mail.unpad.ac.id ^{1*}

Article history: Submit 2025-03-30 | Accepted 2025-04-30 | Published 2025-05-02

Abstrak

Tujuan penelitian ini menganalisis dinamika kehidupan nelayan Pangandaran 1970–2012: transformasi sosial ekonomi dalam konteks negara maritim. Dengan fokus pada perubahan sosial, ekonomi dan politik di Indonesia sebagai negara maritim. Selama periode ini, nelayan beralih dari alat tangkap tradisional ke teknologi modern, meningkatkan hasil tangkapan dan mengubah pola pikir ekonomi mereka. Penelitian menyoroti bagaimana perubahan teknologi, kebijakan pemerintah, dan globalisasi memengaruhi kehidupan nelayan serta dampaknya terhadap kesejahteraan dan identitas komunitas mereka. Metode yang digunakan adalah metode sejarah melalui studi literatur. Data diambil dari sumber primer dan sekunder, seperti buku sejarah dan artikel jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di tengah arus modernisasi, nelayan Pangandaran tetap menjaga tradisi lokal dan budaya maritim, mencerminkan eksistensi mereka terhadap perubahan zaman. Adaptasi nelayan dalam mempertahankan tradisi lokal di tengah modernisasi memperlihatkan bahwa budaya maritim bukan hanya warisan, tetapi juga potensi untuk dikembangkan sebagai identitas dan kekuatan ekonomi negara maritim. Perlu dilakukan penelitian komparatif dengan wilayah pesisir lain di Indonesia untuk memahami pola transformasi nelayan dalam konteks budaya, geografis, dan kebijakan yang berbeda, sebagai dasar perumusan strategi maritim nasional yang holistik.

Kata Kunci: Kesejahteraan, Modernisasi, Nelayan

Abstract

The purpose of this research is to analyze the dynamics of Pangandaran fishermen's lives 1970-2012: socio-economic transformation in the context of a maritime nation. With a focus on social, economic and political changes in Indonesia as a maritime nation. During this period, fishermen shifted from traditional fishing gear to modern technology, increasing their catch and changing their economic mindset. This study highlights how technological changes, government policies, and globalization affect fishermen's lives and their impact on their welfare and community identity. The method used is the historical method through literature studies. Data are taken from primary and secondary sources, such as history books and journal articles. The results of this study indicate that in the midst of modernization, Pangandaran fishermen still maintain local traditions and maritime culture, reflecting their existence against changing times. The adaptation of fishermen in maintaining local traditions in the midst of modernization shows that maritime culture is not only a heritage, but also a potential to be developed as an identity and economic strength of a maritime nation. Comparative research is needed with other coastal areas in Indonesia to understand the pattern of fishermen's transformation in different cultural, geographical and policy contexts, as a basis for formulating a holistic national maritime strategy.

Keywords: Fisherman, Modernization, Welfare

PENDAHULUAN

Pangandaran sebuah daerah pesisir yang terletak di Jawa Barat, Indonesia, memiliki pesona alam yang memikat serta sejarah panjang sebagai pusat kehidupan

nelayan yang kaya akan tradisi maritim. Dengan pantainya yang indah dan lautnya yang kaya, Pangandaran telah menjadi salah satu destinasi wisata populer sekaligus pusat ekonomi berbasis perikanan di wilayah selatan Jawa Barat. Selain itu, memiliki

keanekaragaman budaya baik benda (*tangible*) maupun tak benda (*intangible*) (Ratih 2019; Yanti dkk., 2023). Salah satunya adalah tradisi Hajat Laut. Tradisi ini dilakukan para nelayan untuk kebutuhan spiritual, namun kini pada perayaan tradisi tersebut dijadikan sebagai salah satu daya tarik untuk masyarakat luas. Dimana perayaan tradisi ini diikuti oleh berbagai kalangan masyarakat, termasuk wisatawan dari berbagai daerah.

Seiring dengan berkembangnya zaman, dalam tradisi ini senantiasa ditambahkan unsur hiburan didalamnya untuk menarik perhatian masyarakat dan wisatawan tanpa mengurangi nilai ritual pada tradisi tersebut (Ani Nuraini, Ute Lies Siti Khadijah, 2023). Kabupaten Pangandaran didominasi oleh nelayan yang tinggal di pesisir pantai dimana laut sebagai sumber pendapatan, bukan masyarakat agraris yang jarang ditemukan sebagai petani. Bagi masyarakat petani, seperti yang dikatakan Soediono & Gunawan (1984) tanah merupakan sumber produksi, kebutuhan, dan pendapatan ekonomi, serta kekayaan utama. Dengan demikian, tanah memiliki arti penting dan merupakan kedudukan yang menjadi prestise tersendiri bagi petani yang memilikinya. Sebagai akibatnya, klasifikasi penduduk desa didasarkan pada kepemilikan tanah (Mahardika & Ramadhan, 2020).

Di balik keindahannya dengan berbagai tradisi yang dilakukan, masyarakat Pangandaran menyimpan kisah perjuangan bagi komunitas nelayan yang terus beradaptasi dengan berbagai dinamika sosial, ekonomi, dan politik dari tahun 1970 hingga 2012. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi maritim yang luar biasa, dan sektor perikanan memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional.

Fenomena nelayan Pangandaran sebagai aktor utama berkontribusi besar terhadap sebuah tradisi dan ketahanan pangan serta perekonomian lokal. Namun, kehidupan mereka tidak selalu mulus. Pada dekade 1970-an, nelayan Pangandaran masih mengandalkan metode tradisional dalam menangkap ikan, seperti penggunaan perahu sederhana dan alat tangkap konvensional. Kehidupan masyarakat nelayan saat itu sangat erat dengan tradisi lokal yang sarat akan nilai-nilai gotong royong dan kearifan lingkungan. Seiring berjalannya waktu,

masuknya teknologi modern mulai mengubah cara nelayan Pangandaran bekerja. Di era 1980-an hingga 1990-an, motorisasi perahu dan penggunaan alat tangkap modern seperti jaring *trawl* mulai diperkenalkan. Perubahan ini membawa dampak positif berupa peningkatan hasil tangkapan dan pendapatan bagi sebagian nelayan, tetapi juga menimbulkan kesenjangan sosial di masyarakat. Tidak semua nelayan mampu mengakses teknologi ini, sehingga muncul perbedaan antara nelayan yang memiliki modal besar dan mereka yang masih bertahan dengan metode tradisional (Anwar, n.d.).

Selain itu, globalisasi dan integrasi pasar internasional turut memengaruhi kehidupan nelayan Pangandaran. Permintaan ikan untuk ekspor meningkat pesat, namun harga jual sering kali tidak berpihak kepada nelayan kecil. Ketergantungan pada tengkulak atau pengumpul ikan juga menjadi tantangan tersendiri, mengingat posisi tawar nelayan yang lemah dalam rantai distribusi hasil tangkapan. Perubahan iklim global menambah tekanan pada sektor perikanan di Pangandaran. Fenomena seperti pemanasan laut, perubahan pola arus, dan cuaca ekstrem berdampak langsung pada hasil tangkapan ikan. Nelayan sering kali harus menghadapi ketidakpastian dalam mencari nafkah, terutama ketika musim ikan bergeser atau populasi ikan tertentu menurun drastis akibat *overfishing*.

Di sisi lain, kebijakan pemerintah juga memainkan peran penting dalam membentuk dinamika kehidupan nelayan. Misalnya, pelarangan penggunaan alat tangkap tertentu yang dianggap merusak ekosistem laut menjadi polemik di kalangan nelayan. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut, tetapi sering kali kurang diiringi dengan solusi alternatif bagi nelayan yang terdampak. Program pemberdayaan dan bantuan dari pemerintah kadang tidak tepat sasaran, sehingga memicu ketidakpuasan di kalangan masyarakat nelayan (Komang Suparyana dkk., 2022).

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, masyarakat nelayan Pangandaran tetap berupaya mempertahankan tradisi maritim yang telah diwariskan secara turun-temurun. Tradisi seperti pesta laut, yang merupakan ungkapan syukur kepada Tuhan atas hasil tangkapan, masih dijalankan dengan semangat tinggi. Pesta laut juga

menjadi ajang mempererat solidaritas antarwarga serta memperkenalkan budaya lokal kepada wisatawan. Namun, modernisasi membawa tantangan baru dalam melestarikan tradisi ini. Generasi muda nelayan mulai kehilangan minat melanjutkan profesi sebagai nelayan karena dianggap tidak menjanjikan secara ekonomi (Hamzah & Nurmalia K. Pandjaitan, 2019). Banyak dari mereka yang memilih bekerja di sektor pariwisata atau merantau ke kota besar. Hal ini memunculkan kekhawatiran akan hilangnya identitas maritim yang menjadi ciri khas Pangandaran.

Berbagai penelitian telah banyak mengulas tentang dinamika kehidupan nelayan sebagai representasi negara maritim. Penelitian Wijaya & Fauzie, (2020), memberikan gambaran umum dan makna tentang masyarakat pesisir, bahwa hidup nelayan miskin seperti pada kehidupan nelayan di Desa Gisik Cemandi, Sedati, Sidoarjo. Sebaliknya, Indarti, (2015), memberikan solusi atau siasat-siasat yang bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan melalui penguatan kelembagaan koperasi nelayan yang berkelanjutan.

Penelitian Mike Wijaya Saragih & Teguh Prasetyo, (2023), menyatakan bahwa berbagai bentuk representasi identitas laut yang digambarkan orang laut cerdas dan penuh pengetahuan, sebagai penghuni laut; penjaga laut dan tradisi laut; setia terhadap laut; tradisi mistik; tidak tunduk pada batasan daratan. Adanya faktor kultural yang melekat, menyebabkan individu sulit keluar dari kemiskinan (Anwar & Wahyuni, 2019). Sebenarnya mereka memainkan peran penting dalam kebangkitan dan kejatuhan, berperan dalam mendukung pengetahuan tentang laut (Barnard, 2007).

Dalam artikel ini, sebagaimana penelitian terdahulu yang telah disebutkan, sama-sama menyoroti topik mengenai bagaimana masyarakat pesisir pantai bertahan hidup untuk tetap mempertahankan identitas negara ini sebagai negara maritim dengan tetap mengandalkan sumber daya laut sebagai mata pencaharian utama meskipun banyak hambatan dari berbagai hal. Perbedaan artikel ini dari penelitian sebelumnya terletak pada kedalaman dan ketajaman analisis serta objek penelitian bagi masyarakat pesisir yang mengalami perubahan wilayah sebagai daerah otonom

baru pada tahun 2012. Artikel ini tidak hanya mengangkat isu secara umum, tetapi membahas setiap aspeknya secara spesifik dan menyeluruh, sehingga mampu menawarkan perspektif yang lebih luas dan mendalam. Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis perubahan teknologi, kebijakan pemerintah dan globalisasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah, melalui empat tahapan yaitu: heuristik (pengumpulan data), verifikasi (kritik sumber), interpretasi (penafsiran) dan yang terakhir historiografi (penulisan sejarah) (Kuntowijoyo, 1995). Metode ini sebagai upaya menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (Gottschalk, 2008). Metode ini melalui beberapa tahapan, yakni:

Heuristik sebagai upaya mengumpulkan sumber-sumber sejarah primer dan sekunder yang terkait dengan narasi dikotomis masyarakat nelayan untuk merumuskan representasi identitas masyarakat laut. Kritik digunakan untuk mengevaluasi keaslian dan keandalan dokumen arsip, foto, dan laporan (Kuntowijoyo, 1995). Kritik sumber yang digunakan yaitu kritik internal dan kritik eksternal. Tahapan selanjutnya adalah interpretasi, tahapan ini merupakan tahapan dalam menafsirkan sumber-sumber. Penafsiran dilakukan terhadap data-data yang telah diperoleh dari berbagai sumber yang telah melewati tahapan pengumpulan sumber (heuristik) dan kritik (eksternal dan internal), tahapan interpretasi merupakan Langkah dalam analisis fakta yang ada (Rahmawati & Muhammad Fahmi, 2023). Tahapan terakhir adalah historiografi (Kuntowijoyo, 1995), menempatkan temuan kedalam sejarah (*historical writing*), untuk memahami kesejahteraan dan identitas komunitas nelayan dan sejarah historiografi (*history of historiography*) untuk menganalisis lebih luas bagaimana perubahan teknologi, kebijakan pemerintah, dan globalisasi memengaruhi kehidupan nelayan serta dampaknya terhadap kesejahteraan dan identitas komunitas mereka dalam rentang waktu 1970-2012.

Rentang waktu tersebut memberikan gambaran lengkap tentang transisi

masyarakat nelayan Pangandaran dari era tradisional menuju era modern, termasuk tantangan yang mereka hadapi dan adaptasi yang mereka lakukan. Dengan pendekatan ini, penulis berupaya menyusun artikel yang tidak hanya informatif tetapi juga berdasarkan sumber-sumber yang mendukung kualitas analisis, sehingga mampu menawarkan perspektif yang lebih luas dan mendalam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perubahan Teknologi

Kehidupan nelayan di Pangandaran mengalami perubahan yang sangat besar antara tahun 1970 hingga 2012. Perubahan ini bukan hanya disebabkan oleh faktor teknologi, tetapi juga oleh dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang terus berkembang di Indonesia sebagai negara maritim. Pangandaran, yang dikenal dengan potensi sumber daya alamnya, menjadi saksi dari berbagai transformasi yang mempengaruhi cara hidup masyarakat nelayan, serta pola ekonomi yang mereka jalani. Dari transisi alat tangkap ikan tradisional menuju teknologi yang lebih modern, dampak sektor pariwisata yang berkembang pesat, hingga kebijakan pemerintah yang sering kali memberikan dampak besar bagi kehidupan mereka, semuanya turut membentuk dinamika kehidupan nelayan di Pangandaran.

Pada awal tahun 1970-an, perubahan pertama yang terlihat jelas adalah peralihan dari metode penangkapan ikan tradisional ke penggunaan teknologi yang lebih canggih, seperti mesin diesel untuk perahu nelayan. Sebelumnya, nelayan di Pangandaran hanya mengandalkan perahu tradisional yang digerakkan dengan dayung atau tenaga angin. Namun, dengan adanya mesin diesel, para nelayan dapat menangkap ikan dalam jangkauan yang lebih jauh, meningkatkan hasil tangkapan, dan tentu saja, meningkatkan pendapatan mereka. Perubahan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang lebih besar bagi nelayan untuk lebih berkompetisi di pasar lokal maupun internasional. Mesin diesel ini menjadi simbol modernisasi yang mengubah wajah dunia perikanan di Pangandaran (McCawley, 2017).

Namun, perubahan yang lebih besar lagi terjadi ketika Pangandaran mulai dikembangkan menjadi destinasi wisata pada tahun 1972. Dengan adanya pariwisata, banyak nelayan yang merasa bahwa mereka dapat mengalihkan perhatian mereka dari sektor perikanan yang penuh tantangan menuju sektor yang lebih menguntungkan seperti perdagangan dan jasa pariwisata. Para nelayan mulai menjual tanah pertanian mereka untuk berinvestasi dalam usaha pariwisata, seperti membangun warung makan, penginapan, dan bahkan menyewakan perahu untuk wisatawan. Ini menandai perubahan besar dalam pola pikir masyarakat nelayan, yang sebelumnya bergantung sepenuhnya pada hasil laut, kini mulai beradaptasi dengan ekonomi berbasis pariwisata yang lebih menguntungkan dan berkelanjutan (Afidah, 2022).

Disaat sektor pariwisata menawarkan peluang baru, kehidupan nelayan tidak selalu mulus. Pada akhir 1990-an, Indonesia menghadapi krisis ekonomi yang berdampak luas, termasuk pada sektor perikanan di Pangandaran. Kenaikan harga bahan bakar yang signifikan, yang sangat mempengaruhi biaya operasional perahu nelayan, dan penurunan stok ikan di laut yang mengurangi hasil tangkapan, menyebabkan kesulitan yang lebih besar bagi nelayan. Selain itu, krisis ekonomi ini juga berdampak pada harga barang kebutuhan sehari-hari yang semakin melambung, sehingga semakin memperburuk kondisi kehidupan mereka. Tidak jarang nelayan yang sebelumnya hidup cukup mapan, kini terpaksa menghadapi kesulitan finansial yang mengancam kelangsungan hidup mereka (Tenggara dkk., 1971).

Perubahan dalam ekonomi Pangandaran juga sangat terkait dengan adanya pergeseran struktur sosial yang terjadi seiring dengan berkembangnya sektor pariwisata. Banyak keluarga nelayan yang sebelumnya sangat terfokus pada kegiatan bertani dan memancing, kini beralih ke bisnis yang berkaitan dengan sektor jasa. Misalnya, para nelayan yang memiliki lahan pertanian mulai beralih menjadi pemilik warung makan yang melayani wisatawan, atau bahkan menjual lahan mereka untuk dibangun tempat penginapan. Sektor pariwisata telah merubah pola hidup mereka dari masyarakat yang bergantung pada alam menjadi masyarakat

yang lebih urban dalam pola pikir dan gaya hidupnya.

Sektor perikanan di Pangandaran merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian daerah, yang tidak hanya memberikan sumber pendapatan bagi masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada ketahanan pangan. Perkembangan sektor ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, yang saling berinteraksi dalam membentuk dinamika industri perikanan. Terdapat Faktor internal yang mempengaruhi sektor perikanan di Pangandaran mencakup aspek seperti keterampilan nelayan, teknologi yang digunakan, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat, seperti:

Pertama, yakni teknologi perikanan, memainkan peran penting dalam mengubah pola kehidupan para nelayan di Pangandaran, khususnya dalam konteks peralihan dari metode tradisional ke teknologi modern. Sejak dekade 1970-an, nelayan di daerah ini mulai meninggalkan penggunaan alat-alat penangkapan ikan yang bersifat manual dan sederhana, seperti jaring buatan tangan dan perahu tanpa mesin, dan beralih ke penggunaan mesin bermotor pada perahu mereka (Afidah, 2022). Inovasi ini tidak hanya memudahkan proses penangkapan ikan tetapi juga memungkinkan nelayan untuk beroperasi di area yang lebih luas dan menjangkau perairan yang sebelumnya sulit diakses.

Dengan adopsi teknologi modern, efisiensi penangkapan ikan meningkat secara signifikan, sehingga hasil tangkapan harian nelayan juga bertambah secara substansial. Selain itu, teknologi mesin ini membantu mempercepat waktu operasional nelayan, yang lebih banyak melakukan perjalanan di bandingkan sebelumnya. Namun, transisi ini tidak terjadi secara instan dan merata, karena keterbatasan akses pada modal dan keterampilan penggunaan teknologi menjadi tantangan yang harus dihadapi sebagian nelayan. Sehingga bagi mereka nelayan yang berhasil mengadopsi teknologi modern mendapatkan keuntungan ekonomi di pangandaran secara keseluruhan..

Kedua, keterbatasan armada merupakan tantangan besar bagi nelayan di Pangandaran, meskipun teknologi perikanan telah berkembang. Dikarnakan sebagian nelayan telah beralih ke penggunaan mesin pada perahu mereka, namun tidak sedikit dari

mereka masih menggunakan perahu-perahu kecil yang kapasitasnya terbatas. Perahu kecil ini hanya dapat beroperasi di perairan dekat pantai, membatasi mereka untuk menjangkau wilayah laut yang lebih dalam dan potensi hasil tangkap yang lebih melimpah.

Ketiga, budaya dan kebiasaan nelayan Pangandaran, khususnya dalam praktik penangkapan ikan, masih sangat dipengaruhi oleh tradisi dan metode yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Meskipun teknologi perikanan telah mengalami perkembangan, banyak nelayan lokal yang tetap mempertahankan metode penangkapan ikan yang relatif sederhana, salah satunya adalah "landay fishing". (Raharjo, 2021). Metode ini merujuk pada praktik di mana nelayan pergi melaut pada pagi hari dan kembali ke daratan pada hari yang sama, biasanya sebelum matahari terbenam. Dengan kata lain, mereka hanya menghabiskan waktu singkat di laut, sehingga jarak yang dapat ditempuh untuk mencari ikan pun terbatas.

Kebijakan Pemerintah

Sektor perikanan di Pangandaran merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian daerah, yang tidak hanya memberikan sumber pendapatan bagi masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada ketahanan pangan. Perkembangan sektor ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, yang saling berinteraksi dalam membentuk dinamika industri perikanan. Keterbatasan armada membuat nelayan harus bersaing lebih ketat di perairan pesisir yang semakin padat dan mengalami overfishing. Perahu kecil lebih rentan terhadap cuaca buruk sehingga para nelayan harus menghentikan operasi dan meningkatkan resiko keselamatan. Sedangkan nelayan yang menggunakan kapal besar lebih stabil dan dapat bertahan di laut lepas dalam kondisi yang lebih sulit. Masalah keterbatasan armada ini semakin diperparah oleh keterbatasan infrastruktur pelabuhan yang tersedia di daerah tersebut. Kapal-kapal besar, yang dibutuhkan untuk operasi penangkapan ikan di laut lepas dan memungkinkan nelayan menjangkau area yang lebih jauh, tidak dapat bersandar di pelabuhan yang ada di Pangandaran (Fitriah dkk., 2022). Pelabuhan-pelabuhan ini belum dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, seperti dermaga yang cukup dalam atau area

sandar yang luas, sehingga kapal-kapal besar terpaksa berlabuh jauh dari pantai atau di pelabuhan yang lebih besar di daerah lain. Keterbatasan infrastruktur pelabuhan menghambat pengembangan sektor perikanan di pangandaran dikarenakan nelayan dengan kapal besar harus menggunakan pelabuhan yang lebih jauh, menambah biaya dan mengurangi efisiensi, untuk mengatasi masalah ini, di perlukan investasi dalam pembangunan infrastruktur pelabuhan yang lebih modern dan memadai agar kapal besar dapat bersandar dengan aman. Tanpa peningkatan infrastruktur potensi hasil tangkap di laut lepas akan tetap sulit di akses, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi sektor perikanan.

Terdapat faktor eksternal yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dengan memainkan peran penting dalam pengembangan sektor perikanan di Pangandaran, baik melalui regulasi maupun dukungan langsung. Pemerintah telah mengambil langkah strategis seperti membentuk badan khusus dan menyediakan akses kredit untuk membantu nelayan mengembangkan usaha mereka. Program kredit dengan bunga rendah membantu nelayan mendapatkan peralatan modern dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan hasil tangkapan dan kesejahteraan. Namun, implementasi kebijakan ini seringkali tidak tepat sasaran, tidak disesuaikan dengan kebutuhan daerah, dan dihambat oleh birokrasi dan keterlambatan. Akibatnya, manfaat yang diharapkan dari kebijakan tersebut tidak sepenuhnya dirasakan oleh nelayan lokal.

Faktor eksternal lain yang juga mempengaruhi sektor perikanan Pangandaran adalah perubahan status daerah. Setelah Pangandaran resmi menjadi daerah otonomi baru pada tahun 2012, ada harapan besar bahwa status ini akan membawa dampak positif terhadap berbagai sektor, termasuk sektor perikanan. Dengan adanya otonomi, pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih besar untuk mengatur dan mengembangkan potensi lokal, termasuk perikanan. Kebijakan dan program yang lebih spesifik.

Namun, dalam praktiknya, pengembangan sektor perikanan kalah bersaing dengan sektor pariwisata, yang menjadi fokus utama pemerintah daerah.

Perhatian dan investasi pemerintah daerah lebih banyak tertuju pada pariwisata, sehingga sektor perikanan kurang mendapatkan perhatian yang seimbang. Padahal, sektor perikanan memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan dan dapat menjadi sumber pendapatan alternatif yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal, terutama jika dikelola dengan baik (Anita, 2023). Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih terarah dan investasi yang lebih besar untuk memajukan sektor perikanan di Pangandaran, sehingga nelayan lokal dapat bersaing secara lebih kompetitif dan memanfaatkan kekayaan sumber daya laut yang ada di wilayah tersebut. Jika kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dapat lebih tepat sasaran dan memperhatikan kebutuhan lokal, maka potensi besar sektor perikanan di Pangandaran dapat dioptimalkan secara lebih efektif.

Infrastruktur merupakan salah satu faktor eksternal yang krusial dalam mendukung atau menghambat perkembangan sektor perikanan di Pangandaran. Salah satu elemen infrastruktur yang sangat mempengaruhi aktivitas perikanan adalah fasilitas pelabuhan. Keterbatasan infrastruktur pelabuhan di Pangandaran menjadi hambatan signifikan bagi nelayan, khususnya mereka yang beroperasi dengan kapal besar. Sebagian besar pelabuhan di Pangandaran berukuran kecil dan tidak dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai, seperti dermaga yang cukup dalam, area bongkar muat yang luas, dan fasilitas penyimpanan dingin. Kapal besar yang dibutuhkan untuk menangkap ikan di laut lepas tidak dapat bersandar dengan aman di pelabuhan ini karena kedalaman air yang tidak mencukupi dan fasilitas pendukung yang kurang.

Keterbatasan pelabuhan membuat nelayan dengan kapal besar harus bersandar di pelabuhan lain, yang menambah biaya dan waktu, serta mengurangi efisiensi operasional. Hal ini menghambat potensi hasil tangkapan dan perkembangan kapasitas produksi sektor perikanan. Nelayan kecil juga menghadapi masalah karena kurangnya fasilitas dasar seperti tempat perbaikan kapal dan ruang penyimpanan di pelabuhan, yang membatasi potensi peningkatan hasil tangkapan dan pendapatan. Selain keterbatasan fasilitas pelabuhan, Akses pasar

yang terbatas menjadi kendala besar bagi nelayan di Pangandaran, meskipun sektor perikanan memiliki potensi besar. Banyak nelayan bergantung pada pasar lokal yang skalanya terbatas dan harga jualnya rendah, membuat mereka kesulitan menjual hasil tangkapan secara efektif. Kelebihan pasokan dapat menyebabkan penurunan harga ikan di pasar lokal.

Kurangnya akses ke pasar yang lebih besar, seperti pasar regional atau bahkan internasional, membuat hasil tangkapan nelayan sering kali tidak mendapatkan nilai jual yang optimal (Afidah, 2022). Selain itu, Jaringan distribusi yang kurang efisien juga menjadi kendala, dengan biaya pengiriman yang tinggi akibat infrastruktur jalan dan transportasi yang kurang memadai, yang mengurangi margin keuntungan nelayan. Kurangnya akses langsung ke pembeli atau pasar yang lebih besar memaksa nelayan untuk menjual hasil tangkapan kepada tengkulak dengan harga yang lebih rendah. Situasi ini mengakibatkan pendapatan nelayan yang tidak stabil dan rendah, membuat mereka sulit mengembangkan usaha perikanan secara profesional dan meningkatkan kapasitas penangkapan. Keberlanjutan usaha perikanan terancam oleh fluktuasi cuaca, penurunan stok ikan, dan persaingan dengan nelayan dari daerah lain. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan investasi dalam pengembangan infrastruktur perikanan, seperti peningkatan fasilitas pelabuhan dan akses pasar. Pelabuhan yang lebih modern dan jaringan distribusi yang lebih baik dapat meningkatkan skala usaha, efisiensi, dan pendapatan nelayan.

Lingkungan alam merupakan salah satu faktor eksternal yang sangat memengaruhi aktivitas perikanan, termasuk di wilayah Pangandaran. Kondisi laut yang relatif tenang di Laut Jawa memberikan keuntungan bagi nelayan di Pangandaran, dengan risiko yang lebih rendah dan kemampuan beroperasi lebih sering, keadaan ini memungkinkan penggunaan perahu kecil oleh nelayan tradisional tanpa memerlukan kapal besar yang mahal dan berisiko. Namun di balik keuntungan tersebut, Perubahan iklim global menghadirkan tantangan baru bagi nelayan di Pangandaran dengan peningkatan frekuensi dan intensitas cuaca ekstrem, seperti badai dan gelombang tinggi. Kondisi cuaca buruk memaksa nelayan untuk menunda atau menghentikan operasi, yang

mengakibatkan terhentinya penghasilan mereka. Cuaca ekstrem juga memengaruhi distribusi stok ikan, menyebabkan ikan berpindah ke perairan yang lebih dalam, sehingga sulit dijangkau oleh nelayan tradisional yang beroperasi di perairan dangkal.

Selain itu, perubahan iklim menyebabkan pergeseran musim yang tidak terduga, yang memengaruhi siklus penangkapan ikan yang telah biasa diandalkan oleh nelayan selama puluhan tahun (Sinarjoan & Iskandar, 2023). Peningkatan suhu air laut akibat perubahan iklim memengaruhi populasi ikan di Pangandaran, baik jumlah maupun keragaman spesies. Beberapa spesies ikan mungkin berkurang, sementara yang lain berpindah ke wilayah baru. Jika perubahan iklim tidak ditangani, sektor perikanan Pangandaran akan menghadapi tantangan serius dalam mempertahankan produktivitasnya. Secara keseluruhan, Perkembangan sektor perikanan di Pangandaran selama periode (1970-2012) dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan. Faktor internal meliputi inovasi teknologi, budaya kerja nelayan, dan kapasitas sumber daya manusia. Teknologi yang berkembang meningkatkan efisiensi dan hasil tangkapan, tetapi adopsi teknologi modern masih terbatas pada sebagian kecil nelayan. Budaya tradisional, seperti landay fishing, menjadi kekuatan sekaligus tantangan dalam modernisasi sektor perikanan. Keterampilan dan pendidikan nelayan memengaruhi kemampuan mereka untuk memanfaatkan teknologi dan beradaptasi dengan perubahan.

Faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, infrastruktur, dan kondisi lingkungan berpengaruh signifikan terhadap sektor perikanan di Pangandaran. Kebijakan pemerintah, meskipun mendukung melalui kredit dan program peningkatan kapasitas, sering kali tidak tepat sasaran atau kurang responsif terhadap kebutuhan nelayan lokal. Infrastruktur perikanan yang terbatas, seperti pelabuhan kecil dan akses pasar yang sempit, menjadi kendala untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing nelayan. Kondisi lingkungan, terutama yang terkait dengan cuaca dan iklim, menambah kompleksitas dalam pengembangan sektor perikanan.

Untuk memajukan sektor perikanan di Pangandaran, diperlukan pendekatan holistik yang mencakup peningkatan infrastruktur, pendidikan nelayan, dan kebijakan yang responsif terhadap kondisi lokal. Investasi dalam infrastruktur modern, seperti pelabuhan besar dengan fasilitas lengkap, akan meningkatkan skala dan efisiensi operasi nelayan. Pendidikan dan pelatihan bagi nelayan perlu diperluas untuk mempersiapkan mereka menghadapi tantangan masa depan dan mengadopsi teknologi baru. Kebijakan pemerintah harus lebih terfokus pada kebutuhan lokal dan mendukung pengembangan sektor perikanan yang berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Langkah-langkah strategis ini dapat membantu sektor perikanan Pangandaran berkembang lebih pesat dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat setempat. Perubahan politik di Indonesia juga turut berpengaruh terhadap kehidupan nelayan di Pangandaran. Pada masa Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto, pemerintah fokus pada pembangunan ekonomi yang stabil, termasuk pengembangan sektor maritim. Salah satu kebijakan yang diberlakukan adalah pengendalian harga bahan bakar untuk mendukung aktivitas perikanan. Kebijakan ini awalnya memberikan keuntungan bagi nelayan, karena mereka bisa membeli bahan bakar dengan harga yang relatif lebih murah dan lebih stabil. Namun, kebijakan-kebijakan lain yang dikeluarkan selama era ini kadang tidak berpihak kepada nelayan kecil. Pengelolaan sumber daya alam yang lebih berorientasi pada kepentingan industri besar dan sektor komersial kadang membuat nelayan kecil harus berjuang lebih keras untuk mempertahankan sumber daya alam mereka (McCawley, 2017).

Setelah reformasi 1998, di mana Indonesia mengalami perubahan politik besar, masyarakat nelayan di Pangandaran mulai merasa lebih bebas untuk menyuarakan pendapat mereka dan berpartisipasi dalam proses politik. Hal ini memberikan dampak positif dalam bentuk peningkatan kesadaran politik di kalangan nelayan, yang kemudian mendorong mereka untuk lebih memperjuangkan hak-hak mereka, baik dalam hal pengelolaan sumber daya alam maupun kebijakan pemerintah yang lebih berpihak kepada mereka. Meskipun begitu, tantangan dalam hal akses terhadap sumber

daya tetap ada, karena banyak nelayan yang masih kesulitan mendapatkan peralatan tangkap yang lebih modern atau bahkan akses terhadap pasar yang lebih luas. Selain itu, bencana alam yang melanda Pangandaran, khususnya tsunami yang terjadi pada tahun 2006, memberikan dampak yang sangat berat bagi masyarakat nelayan. Tsunami ini menghancurkan hampir semua fasilitas penting yang menunjang aktivitas nelayan, seperti tempat pelelangan ikan, pelabuhan, dan perahu nelayan. Bagi banyak nelayan, bencana ini bukan hanya merusak mata pencaharian mereka, tetapi juga mengubah kehidupan mereka secara drastis. Proses pemulihan pasca-bencana sangat panjang dan membutuhkan banyak bantuan, baik dari pemerintah maupun organisasi non-pemerintah. Selain kerusakan infrastruktur, dampak psikologis dari bencana alam ini juga mempengaruhi mental dan motivasi nelayan untuk kembali bangkit dan melanjutkan aktivitas mereka.

Dampak Globalisasi dan Identitas Nelayan Pangandaran pada Sektor Perikanan dan Kelautan Terhadap Kesejahteraan.

Sebagai komunitas yang sangat bergantung pada hasil laut, nelayan Pangandaran merespons kebijakan baru dengan berbagai cara, tergantung pada konteksnya.

Program-program pemberdayaan nelayan, seperti penyediaan alat tangkap yang lebih modern dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan, dirancang dengan tujuan mendukung peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Program ini diharapkan mampu membantu nelayan memanfaatkan potensi sumber daya laut secara lebih efektif, sekaligus mengurangi beban operasional yang mereka tanggung. Meski demikian, pelaksanaan program pemberdayaan ini tidak selalu berjalan sesuai harapan. Dalam beberapa kasus, ada kecenderungan sebagian nelayan menjadi terlalu bergantung pada bantuan yang diberikan, sehingga kurang termotivasi untuk berusaha secara mandiri dan memaksimalkan potensi yang mereka miliki (ANWAR, n.d.).

Kondisi ini mendorong pemerintah untuk mencari pendekatan yang lebih strategis dalam merancang kebijakan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melibatkan masyarakat nelayan secara

langsung dalam proses penyusunan program dan kebijakan. Pendekatan ini bertujuan agar kebijakan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi riil di lapangan, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih optimal. Selain itu, keterlibatan nelayan juga dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap program yang dijalankan, sehingga mereka lebih termotivasi untuk memanfaatkannya secara produktif. Dengan pendekatan yang lebih partisipatif, diharapkan pemberdayaan nelayan tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga mampu mendorong kemandirian dan keberlanjutan komunitas pesisir dalam menghadapi tantangan sektor perikanan.

Sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan masyarakat nelayan di Pangandaran pada aktivitas penangkapan ikan, terutama selama musim paceklik, pemerintah mendorong mereka untuk memanfaatkan potensi wisata pesisir. Diversifikasi pekerjaan ini diharapkan dapat menjadi alternatif sumber pendapatan yang lebih stabil dan berkelanjutan bagi komunitas pesisir. Dengan mengembangkan sektor pariwisata, seperti wisata bahari, kuliner, atau kerajinan berbasis laut, nelayan dapat memiliki penghasilan tambahan tanpa harus sepenuhnya bergantung pada hasil tangkapan laut (Grafton dkk., 2010).

Meskipun gagasan ini mendapatkan sambutan baik, penerapannya di lapangan menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pelatihan yang memadai untuk membekali nelayan dengan keterampilan baru yang diperlukan dalam industri pariwisata. Selain itu, infrastruktur pendukung, seperti fasilitas transportasi, tempat wisata, dan sarana promosi, sering kali belum cukup berkembang untuk menunjang potensi wisata secara maksimal. Oleh karena itu, keberhasilan program diversifikasi ini membutuhkan perencanaan yang matang, melibatkan aktif masyarakat lokal, dan dukungan berkelanjutan dari pemerintah, baik dalam bentuk pendampingan maupun pengembangan infrastruktur. Dengan pendekatan yang tepat, diversifikasi pekerjaan ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan menciptakan sumber penghidupan yang lebih beragam.

Kebijakan teknis, seperti penentuan zona tangkap dan pembatasan jenis alat tangkap, sering kali menjadi isu yang kontroversial di kalangan nelayan kecil. Banyak dari mereka menganggap kebijakan tersebut cenderung menguntungkan kelompok nelayan besar atau investor yang memiliki sumber daya lebih untuk beradaptasi dengan aturan baru. Sementara itu, nelayan kecil yang menggunakan alat tangkap tradisional sering kali merasa dirugikan karena harus menanggung biaya tambahan untuk mengganti alat atau menyesuaikan operasional mereka sesuai dengan kebijakan yang berlaku (Grafton dkk., 2010).

Kondisi ini memicu protes dan kritik terhadap pemerintah, terutama terkait dengan ketidakadilan dalam penerapan kebijakan. Nelayan kecil menuntut adanya perhatian lebih dari pemerintah agar kebijakan teknis ini tidak hanya mempertimbangkan aspek keberlanjutan sumber daya laut, tetapi juga keadilan bagi seluruh pelaku sektor perikanan. Mereka berharap pemerintah memberikan pendampingan dan solusi konkret, seperti bantuan alat tangkap yang sesuai aturan, sehingga mereka tetap dapat melaut tanpa merasa terbebani. Dalam hal ini, transparansi dan pelibatan masyarakat nelayan dalam proses pembuatan kebijakan menjadi kunci untuk menciptakan regulasi yang lebih inklusif dan adil.

Kebijakan pemberian asuransi jiwa untuk nelayan di Indonesia mendapat respons positif, karena memberikan rasa aman dalam menghadapi risiko pekerjaan yang tinggi. Pekerjaan sebagai nelayan memiliki tingkat kecelakaan dan bahaya yang cukup besar, sehingga keberadaan asuransi jiwa dirasakan sangat penting untuk melindungi nelayan dan keluarga mereka jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kebijakan ini tidak hanya memberikan perlindungan finansial, tetapi juga membantu meningkatkan penghargaan terhadap profesi nelayan di mata masyarakat, yang sering kali dianggap sebagai pekerjaan yang berisiko tinggi dan kurang dihargai. Dengan adanya asuransi, nelayan merasa lebih dihargai dan merasa ada perhatian dari pemerintah terhadap kesejahteraan mereka. Selain itu, hal ini juga mendorong mereka untuk lebih giat dalam menjalankan profesi mereka, dengan jaminan perlindungan yang lebih baik (ANWAR, n.d.).

Dapat disimpulkan, dinamika kehidupan nelayan Pangandaran pada periode 1970–2012 mencerminkan transformasi multidimensi yang dipengaruhi oleh faktor internal (seperti teknologi, budaya, dan kapasitas SDM) serta eksternal (kebijakan pemerintah, infrastruktur, dan lingkungan). Modernisasi alat tangkap dan berkembangnya pariwisata membuka peluang ekonomi baru, tetapi juga menggeser ketergantungan tradisional pada sektor perikanan. Namun, tantangan seperti krisis ekonomi, keterbatasan infrastruktur, dan perubahan iklim menghambat produktivitas nelayan. Respons masyarakat terhadap kebijakan pemerintah bervariasi, mulai dari adaptasi hingga resistensi, menunjukkan perlunya pendekatan inklusif dan berkelanjutan. Ke depan, penguatan infrastruktur, peningkatan kapasitas nelayan, dan kebijakan yang responsif diperlukan untuk mengoptimalkan potensi sektor perikanan sekaligus menjaga keseimbangan sosial-ekologis di Pangandaran.

KESIMPULAN

Kehidupan nelayan Pangandaran pada periode 1970-2012 mengalami transformasi besar sebagai dampak dari modernisasi, kebijakan pemerintah, globalisasi, serta perubahan lingkungan. Peralihan dari alat tangkap tradisional ke teknologi modern memang meningkatkan produktivitas, namun juga menciptakan kesenjangan sosial di kalangan nelayan. Ketergantungan terhadap bantuan pemerintah, serta terbatasnya infrastruktur pelabuhan dan akses pasar, turut menjadi hambatan utama dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Di sisi lain, berkembangnya pariwisata membuka alternatif ekonomi, tetapi menggeser identitas budaya maritim nelayan, khususnya di kalangan generasi muda.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang menyeluruh dalam pengembangan sektor perikanan, dengan tidak hanya fokus pada alat dan produksi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, budaya, dan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, rekomendasi yang relevan adalah perlunya kebijakan yang lebih partisipatif dan kontekstual, penguatan infrastruktur pelabuhan dan jaringan distribusi, serta peningkatan pendidikan dan

pelatihan bagi nelayan untuk mendorong kemandirian dan daya saing. Diversifikasi ekonomi, seperti ekowisata dan produk olahan laut, juga perlu dikembangkan sebagai strategi berkelanjutan dalam menghadapi tantangan modernisasi tanpa menghilangkan jati diri budaya maritim nelayan Pangandaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Afidah, D. (2022). Dinamika Kehidupan Nelayan Pangandaran (1950-1970 an). *Jurnal Siginjai*, 2(2), 56–67. <https://doi.org/10.22437/js.v2i2.21598>
- Ani Nuraini, Ute Lies Siti Khadijah, S. R. (2023). Dokumentasi pelaksanaan tradisi hajat laut pada media e-booklet dalam upaya pelestarian budaya lokal kabupaten Pangandaran. *Jurnal Artefak*, 10(1).
- Anita. (2023). Trace of Maritime Culture and Trade of the Majapahit Kingdom. *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, 7(2), 712–717. <https://doi.org/10.36526/santhet.v7i2.3146>
- Anwar, A. N. R. (n.d.). *Implementasi Pemberdayaan Nelayan di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran*.
- Anwar, Z., & Wahyuni, W. (2019). Miskin di laut yang kaya: nelayan Indonesia dan kemiskinan. *Sosio-religius: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, 4(1). <https://doi.org/10.24252/sosio-religius.v4i1.10622>
- Barnard, T. P. (2007). Celates, Rayat-Laut, Pirates: The Orang Laut and Their Decline in History. *Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society*, 80(2 (293)), 33–49. <http://www.jstor.org/stable/41493695>
- Fitriah, N. W. N., Kusumadewi, R., & ... (2022). Strategi Pengembangan Sektor Perikanan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangandaran. 20(3), 52–63.
- Grafton, R. Q., Kompas, T., Chu, L., & Che, N. (2010). Maximum economic yield. *Australian Journal of Agricultural and Resource Economics*, 54(3), 273–280. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8489.2010.00492.x>

- Hamzah, A., & Nurmalia K. Pandjaitan, N. W. P. (2019). Respon Komunitas Nelayan terhadap Modernisasi Perikanan. *jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*, 02(02), 191–208.
- Indarti, I. (2015). Model Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Berkelanjutan. *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, 12(1)(1), 63–75.
- Komang Suparyana, P., Putu, I., Indrawan, E., & Septiadi, D. (2022). Emasains Jurnal Edukasi Matematika dan Sains 63 JEMs Faktor Internal Eksternal Peningkatan Hasil Tangkap Ikan Pada Kelompok Nelayan Putra Bahari di Desa Kuranji Dalang. *Jurnal Edukasi Matematika dan Sains*, 9(1), 63–71. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.6410032>
- Kuntowijoyo. (1995). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Benteng Budaya.
- Mahardika, M. D. G., & Ramadhan, F. N. (2020). Politik Beras Dan Gerakan Sosial: Resistensi Petani Unra Sulawesi Selatan Masa Kependudukan Jepang 1943. *Jurnal Artefak*, 7(2), 67. <https://doi.org/10.25157/ja.v7i2.3724>
- McCawley, P. (2017). the Indonesian Economy During the Soeharto Era: a Review. *Masyarakat Indonesia*, 39(2), 269–287.
- Mike Wijaya Saragih, & Teguh Prasetyo. (2023). Representasi Identitas Masyarakat Laut dalam Kumpulan Cerita Pendek Nelayan Itu Berhenti Melaut. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, dan Sastra*, 9(2), 1189–1204. <https://doi.org/10.30605/onoma.v9i2.2958>
- Raharjo, W. A. (2021). Tenggelamkan!: Susi Pudjiastuti's Securitization of IUUF in Indonesia. *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, 3(1), 40–53. <https://doi.org/10.21580/jpw.v3i1.8858>
- Rahmawati, H., & Muhammad Fahmi, R. F. (2023). Konflik Perebutan Tanah Suci Tiga Agama Samawi Di Yerusalem (1980-2017 M). *Jazirah: Jurnal Peradaban dan Kebudayaan*, 3(2), 168–179. <https://doi.org/10.51190/jazirah.v3i2.93>
- Sinarjoan, S., & Iskandar, R. A. (2023). *Sosialisasi kepada nelayan tradisional tentang penggunaan alat tangkap tradisional*. 1(April), 11–17.
- Tenggara, A., Lama, O., Baru, O., Indonesia, B., Ika, B. T., Baru, O., Lama, O., Baru, O., & Indonesia, B. (1971). *File_1517808815*. 1–91.
- Wijaya, A. B., & Fauzie, A. (2020). Pemaknaan Hidup Nelayan (Analisis Makro dan Mikro pada Kemiskinan Nelayan). *Indonesian Psychological Research*, 2(2), 96–108. <https://doi.org/10.29080/ipr.v2i2.259>
- Yanti, E. W., Kusmayadi, Y., & Ratih, D. (2023). Nilai-Nilai Filosofis Tradisi Ngabuku Taun di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran Tahun 1948-2020. *Jurnal Artefak*, 10(1), 89. <https://doi.org/10.25157/ja.v10i1.10069>

